



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



## Menanti Kartu Pepek



## Menyongsong Majalah Digital



Gemuruh pergantian tahun selalu ramai dinanti banyak orang. Sebagian merayakannya dengan bersantai, berlibur hingga berwisata. Sebagian lainnya, terbiasa mencatat resolusi dan harapan agar semakin baik dari tahun sebelumnya.

Di tahun ketiga ini, kami pun beresolusi meluncurkan majalah Cirebon Katon versi digital yang dapat diakses melalui gawai maupun *gadget* para pembaca. Para pembaca bisa mengaksesnya melalui laman <https://majalah-cirebonkaton.com>. Puluhan edisi sejak terbit cetak telah kami sediakan dengan gratis.

Kami berharap, dengan munculnya versi digital akan mempermudah para pembaca yang ingin mengetahui informasi dan berita mengenai kinerja DPRD Kabupaten Cirebon. Juga dengan berbagai isu dan informasi unik mulai dari potensi dan inspirasi yang ada di Kabupaten Cirebon.

Digitalisasi majalah memang sebuah keniscayaan di era digi-

talisisasi yang terjadi saat ini. Teknologi yang terus berkembang disadari atau tidak, telah membawa masyarakat menuju era yang mengandalkan keberadaan jaringan dan perlahan mengubah kehidupan sosial masyarakat.

Terlebih setelah pandemi Covid-19 mulai memporak-porandakan kehidupan dan hingga hari ini belum juga hilang. Seakan menjadi sinyal dan mengharuskan percepatan transformasi menuju tatanan baru dengan tidak lagi mengandalkan pertemuan secara fisik. Pun dengan kami yang mendapatkan masukan, saran dari pembaca untuk menyediakan majalah versi digital.

Meski begitu, wajah majalah digital adalah salinan majalah versi cetak yang telah beredar sebagai upaya menjaga kualitas informasi dan tulisan. Kami tetap membutuhkan masukan, saran dan ide pembaca budiman agar kami selalu berbenah mengevaluasi dan memperbaiki. Salam Cirebon Katon!

### Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

### Pengarah :

**Muklisin Nalahudin, SH, MH.**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**Abdul Rohman**  
(Ketua Komisi 1)

**Mad Saleh**  
(Ketua Komisi 2)

**H. Hermanto, SH**  
(Ketua Komisi 3)

**Siska Karina, MH**  
(Ketua Komisi 4)

### Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

### Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Sulianingrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Drs. H. Sucipto, MM**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

### Redaktur Pelaksana :

**Handi Eko Prasetyo, S.Kom, MM**  
(Kasubag Humas dan Protokol)

### Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

### Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

### Redaktur :

**Yusuf**

### Reporter :

**Maulana • Mu'izz • Hasan • Sarah**

### Fotografer :

**Qushoy**

### Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

### Data dan Riset :

**Oman**

### Distribusi :

**Firman • Misbah**

### Korespondensi :

**redaksi.cika@gmail.com**

### Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

Saat Warga Pra Sejahtera Tak Miliki Jaminan Penyangga:  
Tak Mampu Berobat, Taraf Hidup Tak Layak

## 8 | Kartu Pepek

Solusi Pelengkap Jamkes dan Kesejahteraan



## 14 | KILAS

Hadiri Pelantikan Kuwu Terpilih



## 18 | PUBLIKA

Keberatan Tarif Puskesmas Naik



## 20 | INSPIRASI

Taman Raden Benadi  
Dari Balong Kumuh Jadi Wisata Indah



## 22 | LENSEA

Raut Gigih Manusia Teping



## 24 | PROFIL

Carilla Rohandi Penggerak Desa Sejak Muda

## 28 | DINAMIKA

Komisi I Gali Pengelolaan Aduan Publik KID Jabar

## 30 | Mohammad Luthfi:

RKPD Jangan Hanya Bagi Anggaran

## 32 | Komisi III Studi Banding Rutilahu dan Penataan

Lingkungan Pedesaan

## 34 | Komisi IV Sambangi Yogyakarta dalam Upaya

Mitigasi Bencana Alam

## 36 | POTENSI

Bukit Manengteung

Baru Dibuka, Diserbu Ratusan Wisatawan



## 38 | DESA

Picungpugur  
Ingin Jadi Desa Ramah Anak



## Saat Warga Pra Sejahtera Tak Miliki Jaminan Penyangga: Tak Mampu Berobat, Taraf Hidup Tak Layak

Belum semua warga penyanggah kesejahteraan sosial di Kabupaten Cirebon terdaftar menjadi peserta penerima program KIS maupun KKS. Mengapa bisa terjadi?



Saat matahari baru menampakkan gagahnya sekitar pukul 7 pagi, Fachroji (64) warga asli Desa Mertapadakulon, justru masih duduk termenung di kursi tua depan teras rumahnya. Hampir seminit sekali ia menutup mulutnya karena batuk.

"Batuk saya sekarang sering kambuh. Tenggorokan kena sakit radang," keluh Oji, sapaan akrabnya, lirih.

Oji mengidap radang tenggorokan baru-baru ini, selain penyakit gula darah tinggi yang dirasa sejak 2011 silam.

Setiap hari Oji hanya menghabiskan waktunya di rumah sambil berharap penyakitnya dapat sembuh. Oji tak dirawat di rumah sakit. Ia hanya rutin

meminum obat dari Puskesmas yang dibeli seminggu sekali.

Alasannya, Oji tak punya uang untuk menanggung biaya jika ia dirawat di rumah sakit. Apalagi ia juga tengah menganggur. Mebel yang ia geluti telah bangkrut beberapa tahun lalu. Sementara Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang seharusnya ia dapat agar bisa berobat gratis, juga tak kunjung didapatkan.

"Untuk membeli obat di Puskesmas saja, saya ditanggung anak-anak saya. Harganya Rp 10 ribu untuk satu obat. Sudah 6 bulan lebih saya ngajuin buat KIS. Sampai sekarang belum jadi," ungkap Oji.

Oji sebenarnya telah mengajukan permohonan kepesertaan KIS sejak enam bulan lalu melalui Pusat



Dani Priana (Kasi Jaminan Kesehatan - Dinkes)



Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di desa. Namun hingga kini tak ada kabar baik dari petugas Puskesmas.

"Bilangnya satu kartu keluarga dapat 1 KIS dulu. Tapi sampai sekarang tidak satu pun dari keluarga kami yang memperoleh KIS," ucapnya.

Kartu KIS yang seharusnya bisa memberikan pertolongan kesehatan bagi warga tak mampu laiknya Oji, faktanya belum semua warga di Kabupaten

Cirebon memperoleh. Terlebih Oji juga tak mendapat bantuan apapun untuk keperluan kesehariannya selama sakit.

"Pernah dapat tapi itu bukan melalui kartu. Ada pembagian sembako dari pemerintah desa tahun lalu," ujarnya.

Pemerintah Pusat sejak 2014, telah meluncurkan program bantuan jaminan kesehatan nasional dengan kartu KIS melalui BPJS. Selain KIS, ada pula Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi

masyarakat pra sejahtera untuk peningkatan taraf hidup masyarakat melalui akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Diantaranya program bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diperoleh dalam bentuk sembako senilai Rp 300.000 selama 4 bulan.

Namun pada faktanya, tak semua warga pra sejahtera di Kabupaten Cirebon telah mendapatkan. Seperti yang dialami Tarli (52), warga Desa Gebang seorang buruh tani lepas misalnya. Meski terdaftar sebagai peserta KIS, namun ia tak menjadi penerima KKS. Akibatnya, Tarli belum pernah mendapatkan bantuan pangan apapun seperti BPNT.

"Kalau kartu KIS, saya dapat karena pejabat desa tiba-tiba datang ke rumah saya dan memberikan kartu tersebut. Tapi kalau KKS saya enggak tahu gimana cara daftarnya," ungkap Tarli.

Ia pun berharap, Pemkab Cirebon dapat memperhatikan warga miskin secara menyeluruh. Terutama pemerataan dalam distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinsos Kabupaten Cirebon Eman Sulaeman sadar jika di Kabupaten Cirebon masih ada sebagian warga miskin belum memperoleh KIS maupun KKS. Namun, Eman mengaku, jika Dinsos hanya bertugas mengusulkan pembuatan KIS ke pusat melalui Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS) yang masuk.

"Soal data, lagi-lagi berasal dari Puskesmas. Kadang ada juga yang sudah punya kartunya, tapi setelah dicek malah tidak aktif. Karena double NIK atau NIK terpakai orang lain," jelasnya.





Sebagaimana laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon hingga Desember 2021, progres capaian *Universal Health Coverage* (UHC) Kabupaten Cirebon saat ini turun di angka 91,66 %. Padahal, pada 2021 hingga triwulan I sempat mencapai UHC atau 95 persen dari total penduduk.

Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Dani Priana mengungkapkan, jika penyebab capaian UHC turun dikarenakan kenaikan jumlah penduduk secara signifikan selama pandemi Covid-19. Ia menyebut, jumlah penduduk pada 2021 bertambah hingga 87.192 jiwa setelah banyak warga yang baru melakukan perekaman e-KTP.

“Jadi dari yang KTP nya jadul itu ternyata belum tercatat sebagai penduduk yang terbaru.

Setelah perekaman e-KTP otomatis jumlah penduduk kian bertambah,” jelas Dani.

Selain itu, sebanyak 193 ribu peserta BPJS Kabupaten Cirebon dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) pada Oktober 2021. Penonaktifan tersebut setelah adanya hasil survei Data Terpadu (DT) yang dilakukan oleh Kemensos.

Menurutnya, ada dua penyebab mengapa Kemensos RI menonaktifkan kepesertaan BPJS. Pertama, adanya NIK yang tidak teridentifikasi setelah perpindahan kepesertaan kartu Jamkesmas ke kartu BPJS secara masif.

“Jadi ada validasi NIK yang ternyata banyak ditemukan perbedaan dengan data yang ada di Kemendagri,” ujarnya.

Kedua, kepesertaan ganda, karena *double data*. “Ada 1 NIK

jadi 2 peserta. Ada 2 peserta tapi NIK sama. Tetapi itu bisa diaktifkan lagi, selagi orangnya masih hidup, miskin dan segera melakukan perekaman e-KTP baru,” kata Dani.

### Targetkan Raih UHC 97,5 %

Namun Dani menyadari, jika perlindungan kesehatan di masa pandemi covid-19 begitu penting. Karena itu ia menargetkan tahun ini Kabupaten Cirebon bisa raih kembali UHC hingga 97,5 %.

Ia mengaku, jika Dinkes saat ini tengah memperjuangkan 345.610 warga yang akan diikutkan sebagai penerima program Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Anggaran sebesar Rp 154 miliar yang berasal dari APBD I dan II telah disiapkan peme-



Eman Sulaeman (Kabid Linjamsos - Dinsos)



rintah daerah untuk membayar seluruh iuran BPJS nantinya.

Sementara itu, Kasi Jamsos Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Eman Sulaeman juga mengungkapkan Dinsos tengah berupaya mengusulkan 32 ribu warga miskin ke Kemensos RI untuk menjadi peserta PBI yang dibiayai oleh APBN.

Namun sebelum itu, ia berjanji akan melakukan verifikasi dan validasi (Verval) warga ku-

rang mampu terlebih dahulu secara optimal untuk menghindari kesalahan data.

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Gunarsa, berjanji akan memprioritaskan penyandang disabilitas memperoleh kartu KKS. Oleh karenanya, ia berharap pemerintah desa dapat mengutamakan penyandang disabilitas agar dapat masuk dalam DTKS.

“Setelah mereka sudah ter-

daftar ke DTKS, barulah Dinsos yang akan merekomendasikan agar mendapatkan KKS. Sejauh ini penerima BPNT di Kabupaten Cirebon jumlahnya ada 1.616.729 jiwa,” jelas Gunarsa.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Nana Kencanawati pun, meminta agar Dinkes Kabupaten Cirebon dapat mengoptimalkan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai anggaran Pemerintah Daerah dalam mengupayakan capaian UHC.

“Meskipun kita sadar untuk mencapai UHC tak bisa jika hanya mengandalkan APBD yang jumlahnya terbatas,” ujar Nana.

Pada Mei 2021 lalu, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinsos dan Dinkes sempat bertandang ke Kemensos RI. Komisi IV meminta Kemensos RI memindahkan DTKS warga kurang mampu menjadi penerima PBI JKN-KIS agar dibebankan pada APBN.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon telah mengirimkan surat permohonan dari Dinsos ke Kemensos perihal permintaan tersebut melalui Bupati untuk 88.613 DTKS yang telah diperbaharui sejak Oktober 2020 agar segera ditarik menjadi PBI.

Namun Nana mengingatkan, jika peran utama yang terpenting yakni upaya Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam melakukan verifikasi dan validasi (Verval) data agar proses pendaftaran PBI JKN-KIS bisa tepat sasaran.

“Kemarin Dinsos mengajukan anggaran verval senilai Rp 4 miliar. Kita berharap Dinsos bisa verval secara teliti dan lebih baik. Kita yakin jika data ini bisa beres pada akhirnya semua akan bisa teratasi. Baik soal KIS maupun KKS,” pungkasnya. •Muiz



# Kartu Pepek

## Solusi Pelengkap Jamkes dan Kesejahteraan

Program Kartu Pepek digadang-gadang akan jadi solusi jaminan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang belum menjadi peserta bantuan. Seperti apa?



Salah satu program penanggulangan kemiskinan dan jaminan kesehatan sesuai visi dan misi Bupati Cirebon yakni keberadaan program kartu Pepek. Kartu Pepek digadang-gadang akan menjadi solusi bagi warga miskin di Kabupaten Cirebon yang belum masuk sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS).

Tak hanya itu, mereka yang tidak masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga bisa mendapat manfaat kartu Pepek.

Sejauh ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon mengakui, jika penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami banyak pengurangan. Dari semula 218.864 Keluarga Penerima Manfaat

(KPM) pada akhir tahun 2020 berkurang menjadi 162.572 KPM pada 2021.

Jumlah tersebut, tentu jauh panggang dari api jika melihat jumlah warga miskin yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 25 November 2021 yang masih sebanyak 1.616.729 jiwa.

Kepala Seksi Identifikasi dan Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Astri Diana menyadari, masih banyak warga miskin yang belum menerima bantuan sosial lantaran belum terdaftar DTKS.

Belum lagi masih banyak warga miskin terdaftar DTKS namun hanya mendapat satu program bantuan. Hal itu, kata Astri, dikarenakan terbatasnya anggaran dari pemerintah pusat. Padahal idealnya seluruh warga miskin berhak mendapat seluruh



Astri Diana (Kepala Seksi Identifikasi dan Pemberdayaan Fakir Miskin - Dinsos)



bantuan JKN-KIS, PKH, BPNT maupun BLT.

"Tapi kita juga menyadari APBN pemerintah pusat juga terbatas apalagi sejak pandemi Covid-19," kata Astri.

Sehingga sebagai solusinya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menginisiasi program kartu Pepek sebagaimana tercatat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022. Astri mengungkapkan, program kartu Pepek akan mulai diluncurkan

pada 2023 mendatang.

"Memang kalau yang buat *grand desain* kartu Pepek itu tim Pak Bupati. Kalau kita mengusulkan Pepek dimulai pada 2023," ungkapnya.

Meski begitu, Astri juga belum dapat menerka bentuk kartu Pepek nanti seperti apa. Namun menurutnya, penerima program Pepek akan dapat menggunakan dengan tanpa kartu fisik.

"Kita sudah gunakan *by system*. Misalnya yang terdaftar DTKS, maka secara otomatis su-

dah bisa mendapatkan program Pepek dan bisa memanfaatkannya dengan tidak menggunakan kartu," ujarnya.

Pembahasan rencana program kartu Pepek sebenarnya juga telah berlangsung sejak Maret 2021 lalu saat rapat koordinasi dan evaluasi di kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, mengatakan program kartu Pepek sudah dibuat oleh dinas-dinas terkait seperti Dinsos, Dinkes dan Disdukcapil maupun dinas lainnya.

Astri menyampaikan, alasan program kartu Pepek tidak dilakukan pada tahun ini dikarenakan terbatasnya anggaran APBD daerah. Pemkab Cirebon saat ini tengah berupaya melakukan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

"Hasil rapat bersama DPRD tahun kemarin, kita telah mengusulkan anggaran Rp 25 miliar untuk program kartu Pepek di tahun 2020. Namun tidak disepakati lantaran APBD yang terbatas. Maka itu, kita akan lakukan di 2023," ungkapnya.

Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih, meminta agar program Kartu Pepek tak bermasalah karena kesalahan data maupun tumpang tindih data. Sehingga saat ini Dinsos pun tengah melakukan verifikasi dan validasi (*verval*) data warga miskin untuk diajukan ke Kemensos. Dinsos tidak mau sembarangan menetapkan hasil *verval* karena nantinya akan berpengaruh pada penerima program Kartu Pepek.

"Sekarang datanya masih proses. Kebijakan Kemensos baru semua yang mendapat bantuan sosial harus masuk DTKS. Setiap bulan kita masih *verval*," kata Astri.



## Siska Karina: Pastikan Verval Data Sebelum Kartu Pepek Diluncurkan

Dalam APBD 2022, program kartu Pepek menjadi solusi dalam menyelesaikan persoalan jaminan kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon. Reporter Cirebon Katon pun mewawancarai Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina untuk meminta pandangannya. Berikut petikannya:



### *Seperti apa pandangan Komisi IV mengenai program kartu Pepek yang diinisiasi Pemkab Cirebon?*

Dalam kamus bahasa Jawa, *Pepek* itu kan artinya lengkap. Maksudnya, jaminan kesehatan dan bantuan sosial untuk warga Kabupaten Cirebon yang belum menjadi kepesertaan kesehatan maupun bantuan sosial lainnya dapat ditutupi dengan kartu itu nantinya.

Jadi, kartu Pepek sebagai kartu pelengkap yang diperuntukkan warga kurang mampu untuk mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Mereka yang tidak mampu, tidak memiliki kartu BPJS dan tidak pernah mendapatkan bantuan sosial seperti BPNT, PKH dan lain-lain dari Kementerian Sosial RI berhak memperoleh kartu Pepek.

Karena banyak warga yang kurang mampu



Siska Karina (Ketua Komisi IV)

yang belum mendapat bantuan dari Dinas Sosial. Berarti itu harus dicover oleh kartu Pepek. Itu memang harus berjalan. Tetapi jangan sampai tumpang tindih. Nantinya pelanggaran. Misalnya sudah punya KIS dan mendapatkan bantuan sosial lain mereka justru tetap mendapatkan kartu Pepek. Itu pelanggaran. Karena akan *double* anggaran.

### *Apa benar kalau kartu Pepek itu program Bupati saja?*

Ya, ini programnya Bupati periode 2019-2024. Pada saat mencalonkan jadi Bupati, ada salah satu program yakni kartu Pepek. Itu janji politik, maka harus dilaksanakan dan direalisasikan. Jadi enggak aneh kalau muncul dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).

### *Sebenarnya sejauh ini seperti apa penanganan jaminan kesehatan dan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon?*

Sebagain besar masyarakat Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah terlindungi Jaminan Kesehatan dan Sosial (Jamkesos). Persentasenya mencapai 93 % dari jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Tetapi itu tentu belum *Universal Health Coverage* (UHC).

Sedangkan penerima bantuan BPNT PKH dan lain-lain dari Kemensos RI sudah sekitar 1,6 juta orang dari jumlah penduduk 2,3 juta jiwa. Itu dilihat dari jumlah warga Kabupaten Cirebon yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Artinya, sisa jumlah warga Kabupaten Cirebon yang belum terlindungi jaminan kesehatan maupun kesejahteraan masih sangat banyak. Pemerintah Daerah belum mampu menutupi sisa jumlah tersebut karena APBD yang defisit atau terbatas. Sehingga harus dicover oleh APBN.

### *Apa langkah Komisi IV yang sudah dilakukan?*

Kami di Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon bersama Dinsos dan Dinkes sebenarnya telah mengunjungi Kemensos RI pada Juni 2021 lalu. Dalam kunjungan, Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada Kemensos RI agar DTKS warga kurang mampu dapat dipindahkan menjadi penerima PBI JKN-KIS yang dibiayai pemerintah pusat.

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon telah mengirimkan surat permohonan dari Dinsos ke Kemensos perihal permintaan tersebut. Selain itu juga telah mengirimkan surat melalui Bupati ke Kemensos untuk 88.613 DTKS yang telah diperbaharui sejak Oktober 2020 agar sesegara mungkin ditarik menjadi PBI APBN.

Tetapi Kemensos RI belum bisa menerima penambahan PBI yang dibiayai APBN. Kemensos RI menyarankan agar PBI yang ada di Kabupaten Cirebon divalidasi terlebih dahulu NIK-nya, agar proses itu lebih cepat. Lagi-lagi karena data.

### *Kalaupun memang sangat urgent sejauh mana kemampuan daerah mencover pembiayaan Kartu Pepek melalui APBD?*

Harusnya tahun 2022 sekarang, kartu Pepek sudah berjalan, bahkan sudah masuk dalam KUA PPAS. Tetapi saat pembahasan kemarin, karena anggaran defisit kartu Pepek tidak bisa dilaksanakan di tahun 2022.

### *Dinsos baik Dinkes mengatakan Kartu Pepek akan mulai diluncurkan pada 2023?*

Ya, jadi kemungkinan tahun 2023 harus direalisasi. Insya Allah soal anggaran Belanda Daerah





pemerintah daerah 2023 kayaknya mampu. Harus dipaksakan untuk melaksanakan program Kartu Pepek. Karena itu program visi-misinya Bupati. Kalo tidak terlaksana, kedepan jangan dipilih lagi bupatinya

Harusnya kalo rencana program ini dijalankan di tahun 2023. Maka pembahasannya harus dimulai dari sekarang. Sekitar bulan april dan mei harusnya bisa masuk KUA-PPAS. Itu janji politiknya bupati.

**Langkah apa yang seharusnya dilakukan Pemkab Cirebon sebelum meluncurkan kartu Pepek?**

Kalau pendapat saya, pertama, harus sosialisasi dulu ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang sudah memiliki kartu BPJS, mendapatkan bantuan sosial, mereka dapat lagi kartu Pepek. Ini nantinya double anggaran.

Sejauh ini soal BPJS soal data belum optimal. Makanya perlu disosialisasi ke masyarakat. Siapa yang harus sosialisasi? Yah semua stakeholder kabupaten Cirebon. Baik Bupati, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan kami di DPRD.

Kedua, ini yang paling penting. Adalah pen-

dataan yang masih belum clear sampai sekarang. Verval dulu saja datanya. Apalagi di 2022 akhir harus ada single data atau datanya harus terpusat nih.

Persoalan sekarang kan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan dinas yang lain justru memiliki data masing-masing. Berbeda antar satu dinas. Jadi ini ribet. Maka harus ada single data yang nantinya data bisa terpusat. Manfaatnya nanti bisa ketahuan jumlah warga yang belum mendapatkan bantuan apapun.

Kita melihat penanganan jaminan kesehatan maupun kesejahteraan hingga kini persoalannya masih sama yakni pada tahap pelaksanaan verifikasi dan validasi (verval) yang masih statis. Ini berpotensi banyak warga yang sebenarnya mampu tetapi malah terdaftar DTKS. Sehingga penerima jaminan kesehatan maupun kesejahteraan banyak yang tidak tepat sasaran.

Sementara syarat penerima kartu Pepek nanti juga harus terdaftar di DTKS terlebih dahulu. Kuncinya sinergitas antar stakeholder soal data itu. Masalah teknis kita kembalikan ke dinas masing-masing. •Suf/Muiz

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079



# Hadiri Pelantikan Kuwu Terpilih

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi beserta Forkopimda Kabupaten Cirebon menghadiri pelantikan 135 kuwu yang terpilih pada pilwu serentak 2021.



Foto: foto: qusey/dk



# Penetapan Propemperda 2022

DPRD Kabupaten Cirebon menggelar paripurna penetapan dan persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun 2022.



Foto: foto: qusey/dk



# Sinkronisasi Program Kerja 2022

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon mengenai sinkronisasi program kerja dan kegiatan tahun 2022.



Foto: foto: qusey/dk



# Bahas Pokir DPRD 2023

DPRD Kabupaten Cirebon berdiskusi dengan DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk membahas dan menyusun pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2023.



Foto: foto: qusey/dk





## Keberatan Tarif Puskesmas Naik

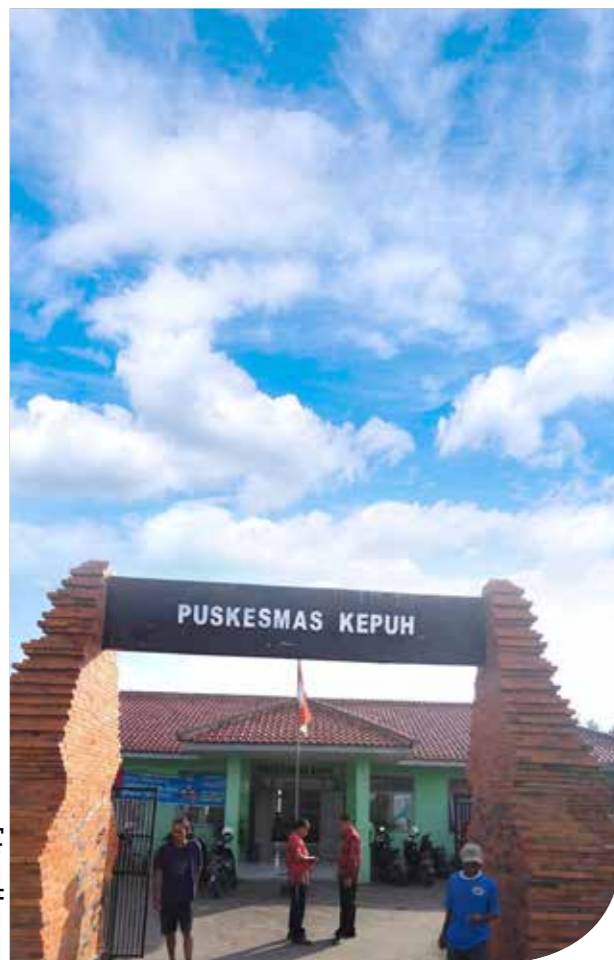


Foto: worldngs.com

Salam hormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Nur (38), asal Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan. Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai kenaikan tarif Puskesmas di Kabupaten Cirebon yang menurut saya cukup memberatkan. Meskipun besaran tarifnya relatif terjangkau, tetapi dampaknya akan tetap terasa bagi masyarakat kurang mampu seperti saya.

Saya berharap bapak/ibu anggota dewan dapat meninjau dan mengkaji mengenai kebijakan tarif di Puskesmas ini. Sehingga manfaatnya tetap bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr Wb  
(Nur/Buruh/Cirebon)



Foto: fajarcirebon.com

## Korban Puting Beliung Minta Bantuan Perbaikan

Assalamualaikum Wr. Wb  
Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang terhormat. Saya Hasan (26) Warga Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang. Seperti yang diketahui, beberapa waktu yang lalu, musibah angin puting beliung sempat melanda sebagian desa di Kecamatan Gebang, salah satunya di Desa Gebang Kulon. Musibah ini berdampak beberapa unit bangunan dan rumah milik warga rusak hingga ambruk akibat tersapu angin.

Hal ini tentu menimbulkan trauma sekaligus kerugian materil bagi mereka yang terdampak. Kiranya Bapak/Ibu Dewan atau melalui dinas yang menangani bencana alam dapat membantu kami untuk membangun atau merenovasi kembali unit bangunan yang sempat rusak akibat musibah yang terjadi.

Terimakasih  
(Hasan/Wiraswasta/Cirebon)

## Mohon Tertibkan Jalan Trotoar Fatahillah

Assalamualaikum Wr Wb  
Kepada Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Nining (25) dari Watubelah Kecamatan Sumber.  
Saya ingin melaporkan kondisi trotoar di Jalan Fatahillah Sumber yang hari ini banyak dimanfaatkan menjadi lapak semi permanen pedagang. Menurut saya, hal ini terlihat kurang sedap dipandang, karena menyangkut estetika dan keindahan daerah itu sendiri.

Saya harap Bapak/Ibu Anggota Dewan dapat berkoordinasi dengan dinas yang berwenang guna memberikan edukasi bagi para pedagang yang menggelar lapaknya di atas trotoar, dan jikalau perlu lakukan langkah penertiban.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
(Hasan/Wiraswasta/Cirebon)



## Perlu Palang Pintu Otomatis



Assalamualaikum Wr. Wb  
Yang terhormat Bapak/Ibu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Perkenalkan saya Malik dari Desa Gamel, Kecamatan Plered. Saya ingin menyampaikan jika di desa kami tepatnya Jalan Syekh Datul Kahfi terdapat jalan kereta api yang tidak berpalang pintu.

Oleh karena itu kami berharap, Pemkab Cirebon dapat menyediakan alat bantu keamanan berupa palang pintu kereta otomatis. Selain alasan keamanan, penyediaan sarana ini juga bermaksud agar warga pengguna jalan dapat lebih disiplin ketika melewati perlintasan kereta.

Saya berharap, kami dapat ditindaklanjuti, mengingat peran alat bantu ini begitu penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas kereta api, serta meminimalisir angka kecelakaan lalulintas.

Terimakasih Cirebon Katon.  
(Malik/Gamel/Cirebon)



## Taman Raden Benadi Dari Balong Kumuh Jadi Wisata Indah

Semula Taman Benadi milik Bumdes Kepuh hanya seceruk balong air dan taman yang tak terurus hingga menjadi wisata indah yang murah meriah hanya dengan Rp 2 ribu rupiah. Bagaimana bisa?



Keindahan Taman Raden Benadi di Desa Kepuh, Kecamatan Palimanan, menjadi daya tarik baru bagi para wisatawan di Kabupaten Cirebon. Peralannya selain memiliki tempat yang mempesona dengan latar belakang Gunung Ciremai dan dikelilingi hamparan sawah, taman ini juga memiliki wahana air yang indah.

Para pengunjung, bisa menikmati keindahan taman dengan mengapung mengitari balong ditambah sejuknya udara dan wahana taman bersih dengan biaya yang murah.

Meski belum lama diresmikan, Taman Raden Benadi telah banyak dikunjungi para wisatawan lokal. Hampir setiap hari di waktu sore wisata ini padat didatangi puluhan orang.

Taman Raden Benadi, dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kepuh. Semula tempat tersebut hanya berupa balong yang dikenal warga dengan sebutan Balong Kepuh yang tak terurus. Namun, semua berubah pasca Maskari, Kuwu Desa Kepuh

menjabat kepala desa.

Maskari melihat potensi besar di kawasan sekitar balong. Ia pun tak ingin ide itu hanya terpendam di pikirannya. Maskari berscepat mendiskusikan dengan Bumdes untuk merencanakan pembangunan wisata. Meski sempat mengalami pro dan kontra dari beberapa kelompok masyarakat, Maskari tak menyerah untuk mewujudkan sumber daya alam di Desa Kepuh menjadi bermanfaat.

"Waktu itu memang ada pro dan kontra. Tapi itu hal wajar bagi saya. Yang penting tahu prosedurnya, mana masukan yang baik akan saya terima tapi kalau masukannya kurang baik mohon maaf, saya selaku pemimpin desa kan punya tanggung jawab dan prinsip. Makanya saya lanjutkan," jelas Maskari.

Setelah melalui diskusi dan rencana, Maskari pun mulai membangun wisata di atas lahan seluas 1,5 hektare tersebut dengan dana desa dan tambahan bantuan modal dari dana CSR Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon. Ia pun memper-



baiki taman yang ada di dekat balong dan melengkapi fasilitas MCK, musala hingga pengadaan tempat sampah di beberapa titik.

"Kira-kira tepatnya setelah 6 bulan saya dilantik jadi kuwu kita mulai benahi potensi alam itu. Setelah ada dana kita perbaiki taman, fasilitas umum dan membeli perahu dayung kaki. Dan alhamdulillah akhir Desember 2021 kemarin telah diresmikan Bupati Cirebon," ungkapnya.

Dengan berdirinya wisata Taman Raden Benadi Maskari berkeyakinan, akan menjadi aset desa yang nantinya dapat membantu meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) hingga usaha kecil milik warga sekitar.

Benar saja, baru sekitar 10 hari setelah diresmikan, wisata taman dan balong tak pernah sepi pengunjung. Ia pun meyakini peluang ini akan menumbuhkan geliat ekonomi dan memberi ruang UMKM bagi warga desa.

"Alhamdulillah sejauh ini taman selalu ramai. Sudah banyak pedagang juga di sekitar taman. Apalagi kalau hari Minggu atau hari libur lainnya. Kemarin saya dapat laporan, pemasukan belum genap sepuluh hari sudah Rp 6 juta sekian," ungkap Maskari.

Untuk masuk menikmati taman, para pengunjung cukup mengeluarkan uang kocek senilai Rp 2 ribu rupiah sebagai ganti

biaya parkir saja. Sementara untuk menaiki perahu di atas balong cukup membayar Rp 10 ribu.

"Pengunjung bukan hanya dari warga Kepuh ataupun sekitarnya, tapi warga dari Kabupaten Indramayu juga sempat datang ke Taman Raden Benadi. Mungkin karena tiketnya cukup murah," kata Maskari.

Pemasukan dari wisata tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk kas Bumdes, biaya operasional kebersihan dan petugas. Selain dikelola anggota Bumdes, Taman Raden Benadi juga memberi kesempatan bagi para pemuda Desa Kepuh dengan menjadi petugas pengawas aktivitas pengunjung di Taman.

Menurut Maskari, nama Taman Raden Benadi tak sembarang dipilih. Nama itu ia ambil dari tokoh asal muasal Desa Kepuh bernama Raden Benadi, seorang penyebar agama Islam keturunan Kesultanan Cirebon. Dia berharap dengan nama itu, wisata tersebut akan diberkahi sekaligus juga mengangkat sejarah tokoh desa.

Ke depannya, Bumdes Kepuh tengah merencanakan pengembangan wisata agar lebih menarik dengan penambahan wahana seperti *flying fox*, kolam renang dan pemancingan. Maskari berharap, wisata desa ini dapat dikenal masyarakat luas dan dapat menginspirasi desa-desa lain yang memiliki sumber daya alam agar berani dimanfaatkan.

"Tahun 2022, kami sudah merencanakan akan menambahkan beberapa wahana untuk hiburan pengunjung. Kami juga terus mempromosikan Wisata Taman Raden Benadi ini melalui kanal media sosial *youtube* dan lainnya. Semoga ke depan bisa lebih bagus lagi," pungkasnya. •Par



# Raut Gigih Manusia Tepung

Puluhan tahun sudah Wasmin dan sejawatnya beprofesi menjadi kuli tepung.

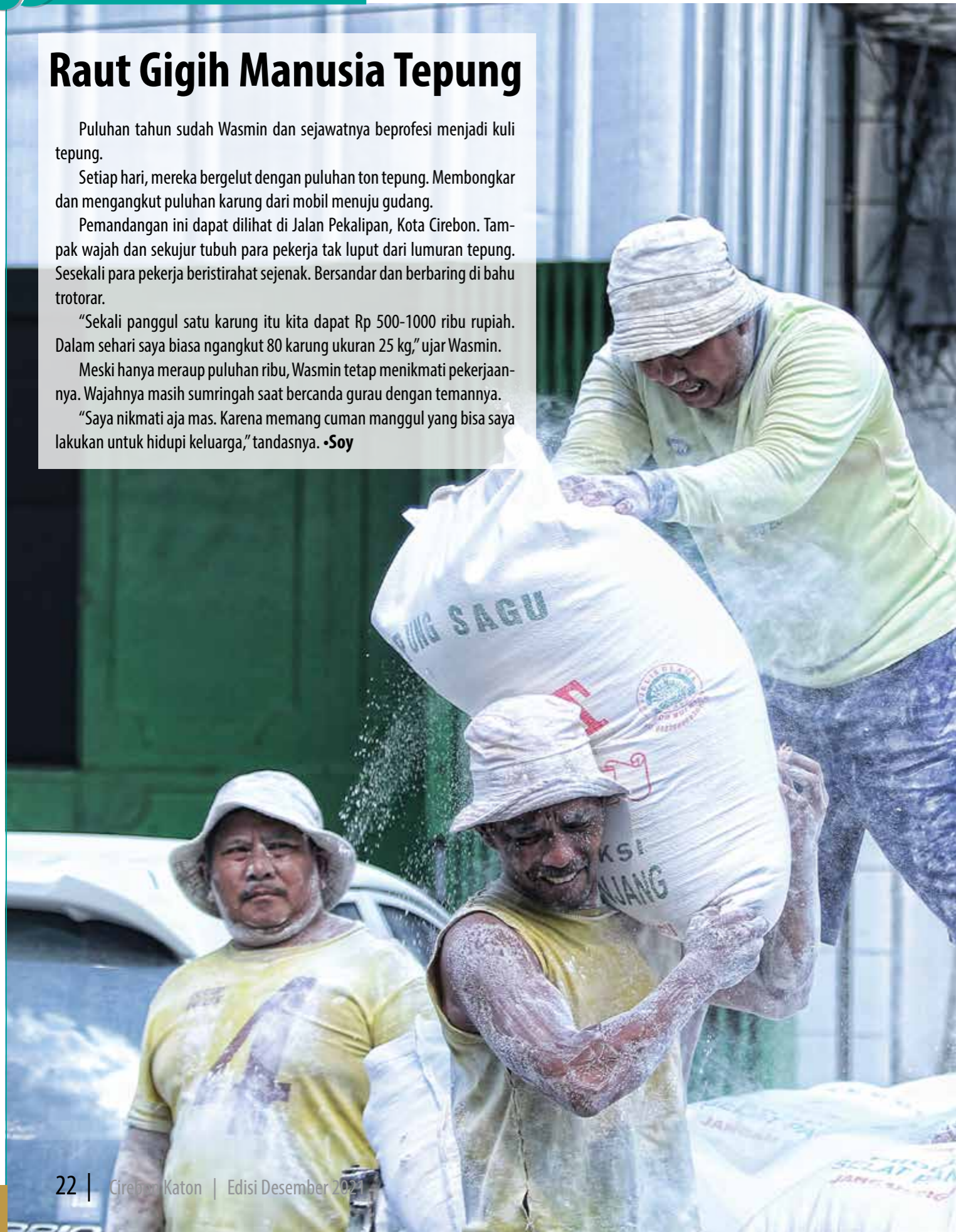
Setiap hari, mereka bergelut dengan puluhan ton tepung. Membongkar dan mengangkut puluhan karung dari mobil menuju gudang.

Pemandangan ini dapat dilihat di Jalan Pekalipan, Kota Cirebon. Tampak wajah dan sekujur tubuh para pekerja tak luput dari lumuran tepung. Sesekali para pekerja beristirahat sejenak. Bersandar dan berbaring di bahu trotoar.

“Sekali panggul satu karung itu kita dapat Rp 500-1000 ribu rupiah. Dalam sehari saya biasa ngangkut 80 karung ukuran 25 kg,” ujar Wasmin.

Meski hanya meraup puluhan ribu, Wasmin tetap menikmati pekerjaannya. Wajahnya masih sumringah saat bercanda gurau dengan temannya.

“Saya nikmati aja mas. Karena memang cuman manggul yang bisa saya lakukan untuk hidupi keluarga,” tandasnya. •Soy





## Carilla Rohandi Penggerak Desa Sejak Muda

Carilla mengawali karirnya dari desa, dan sempat menjabat anggota BPD sebelum berlabuh menjadi anggota partai. Bagaimana kisahnya?

Laki-laki itu begitu ramah. Tersenyum dengan penuh wibawa saat berbincang dengan sejawatnya. Ia begitu lekat dengan peci hitam yang selalu dikenakan. Meski usianya sudah menginjak paruh baya, Carilla, tak terlihat lemah fisik. Justru sebaliknya. Carilla begitu bugar. Ia memang selalu menjaga kondisi tubuhnya dengan rutin berolahraga.

"Saya memang gemar berolahraga. Makanya sering-seringlah berolahraga, agar bisa melepas semua beban yang ada dalam pikiran juga," celetuk pemilik nama lengkap Carilla Rohandi, sambil tertawa.

Carilla begitu menggemari cabang olahraga tenis meja. Meski saat ini kesibukannya begitu padat. Di akhir pekan, Carilla tak pernah absen meluangkan waktunya untuk bermain tenis.

Pria kelahiran 1965 asal Desa Suranenggala, Kecamatan Suranenggala, itu sejak remaja juga aktif di lingkungan desa. Carilla muda sering dinobatkan menjadi pemimpin. Dari ketua suporter sepak bola hingga menjadi ketua karang taruna.

"Sejak SMA saya udah aktif pada kegiatan yang ada di desa. Di usia 18 tahun, saya jadi ketua karang taruna karena diminta masyarakat," kenangannya menceritakan.

Alasannya, Carilla dianggap sebagai keturunan keluarga yang telah turun-menurun menjabat perangkat desa.

"Jadi kalau orang desa kan menganggap itu seperti prasyarat. Kalau saya akan jadi orang desa," kata Carilla.

Namun pada faktanya, Carilla justru sempat bercita-cita bergabung dengan tentara meski di tengah jalan, ia



memilih menekuni usaha.

"Ya saya sempat ingin sekali menjadi anggota TNI, karena memiliki wibawa di mata masyarakat dan juga bisa mengabdikan pada negara," tuturnya.

Semasa muda, Carilla menempuh pendidikan di SMA Karang Ampel, Kabupaten Indramayu, dan menamatkannya pada 1987. Selepas itu, Carilla terlebih dahulu bekerja menjadi penjahit sebelum melanglang ke Jakarta dengan berjualan sembako.

Sepulang dari Jakarta, Carilla melanjutkan usahanya di desa. Tak lama, ia pun kembali mengurus desa setelah diamanahkan menjadi pengurus BPD.

"Saat itu, namanya masih Badan Perwakilan Desa (BPD). Saya di percaya untuk memegang bidang ekonomi, dan membentuk koperasi simpan pinjam

di desa," ungkap Carilla

Sementara karir politiknya, Carilla memulai dari menjadi pengurus tingkat desa hingga cabang.

Tepatnya pada 2005, Carilla resmi bergabung dan menjabat sebagai anggota PDIP. Tak lama, ia pun dipercaya menjabat Ketua PAC hingga akhir periode.

Dua periode berikutnya, tepatnya tahun 2010, ia mengemban amanat sebagai Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Cirebon.

"Saya masuk PDI sebenarnya karena orangtua saya dulu simpatisan Bung Karno. Meski tidak masuk dalam anggota resmi, tapi aktif di Partai Nasional Indonesia (PNI) waktu itu," jelasnya.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2014, Carilla mencalonkan diri setelah didorong keluarga dan masyarakat berkat pengabdian di desa. Ia pun

terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2014-2019 dengan membawa visi dan misi membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi.

Kinerjanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon dirasa berhasil. Sehingga pada pemilihan legislatif berikutnya ia kembali didorong keluarga dan masyarakat untuk mencalonkan diri. Hasilnya pun Carilla kembali diamanahkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024.

"Bagi saya waktu mencalonkan diri, itu seperti arena pembelajaran untuk mengabdikan di Cirebon. Dan alhamdulillah terpilih. Dan ini menjadi kesempatan untuk saya melakukan semua perubahan dengan menampung semua aspirasi masyarakat," pungkasnya. •Lan



## Hanafi SH: Puluhan Tahun Jadi Juru Kunci Petilasan

Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon 2 periode, Hanafi mengawali karirnya menjadi hansip, juru kunci dan kepala desa. Bagaimana kisahnya?

Menjadi wakil rakyat tak membuat Anggota DPRD Kabupaten Cirebon bernama Hanafi, melupakan jati dirinya sebagai warga biasa. Setiap hari, sebelum berangkat ke kantor, Hanafi akan menyibukkan diri menuju sawah miliknya. Ia akan melihat perkembangan tanaman padi di lahan tak kurang 10 hektare lebih. Maka tak aneh jika ditemui di rumah atau di sawah, Hanafi tak terlihat layaknya seorang pejabat.

"Saya memang sudah bertani padi semenjak menikah. Dari semula hanya punya 1 hektare lahan, alhamdulillah sekarang kurang lebih ada 10 hektar lebih padi," ujar Hanafi.

Di puluhan hektar sawah miliknya, ia mempekerjakan puluhan warga sekitar sebagai penggarap lahan. Ia berkeinginan memberikan kesempatan bagi warga yang tak memiliki modal melalui sistem bagi hasil.

Meski begitu, bukan tak pernah Hanafi menemui hambatan saat menekuni bidang pertanian. Terkadang ia juga harus merugi saat hasil panennya gagal.

"Tahun kemarin saja saya mengalami kecewa karena tanam 3 kali tapi panennya Cuma sekali, karena banjir. Tapi bagaimana lagi ini kan konkuensi," keluhnya menceritakan.

Pria yang lahir di Desa Lemahtamba, Kecamatan Panguragan, selain bertani, juga seorang peternak ulung. Hobi yang



ditemukan karena alasan usia yang sudah menua dan karena berkeinginan mendukung program pemerintah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Ia pun beternak entok dan ayam kampung.

"Ya karena sudah hobi aja sih. Tadinya olahraga tapi karena sudah enggak sanggup ya saya alihkan dengan beternak ayam kampung saja," katanya.

Hasilnya hewan ternak itu akan Hanafi jual di pasaran. Ia juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana bertemu pembeli.

"Saya biasa menjual melalui facebook untuk jualan ayam. Harga per kilonya Rp 35 ribu," jelas Hanafi.

Sebelum beternak dan bertani, Hanafi sempat berprofesi sebagai kuncen atau juru kunci petilasan di Lemahtamba selama 25 tahun lebih. Ia dipercaya masyarakat sekitar menjaga peninggalan sejarah Raden Walangsungasang pada zaman

dulu. Ia pun diberikan primbon oleh keluarga sebagai pegangan menjadi kuncen.

"Tak kurang puluhan tahun memang saya dikenal menjadi kuncen petilasan Raden Walangsungasang. Bahkan hingga sekarang sebagian orang, justru lebih kenal saya kuncen dari pada dewan," timpalnya terkekeh.

Selama menjadi kuncen petilasan, Hanafi dituntut oleh masyarakat untuk menjadi orang yang pandai di segala hal. Terutama dalam kepercayaan adat dan metafisika. Ia bak dituntut menjadi dewa untuk menyelesaikan persoalan setiap orang. Akibatnya Hanafi begitu banyak mempelajari hal baru. Bahkan mendengarkan segala keluhan rakyat dalam kehidupannya.

"Menarik selama menjadi kuncen, saya dituntut harus bisa semua. Ada yang meminta pasang susuk, minta diobatin penyakitnya, bahkan pernah ada yang minta kebal tubuh," ujarnya.

Bukan tanpa alasan para masyarakat berkeluh ke Hanafi saat menjadi kuncen. Sebagian para pengunjung sangat meyakini jika Lemahtamba menjadi wasilah untuk mengobati berbagai penyakit.

"Warga yakin itu karena nama desa ini juga diambil dari petilasan. Dimana lemah bermakna tanah dan tamba itu obat," terangnya.

Sementara perjalanan karirnya sebelum menjadi juru kunci, Hanafi sempat menjabat kepala desa selama 10 tahun. Tepatnya pada 2013 hingga 2013 ia memimpin desa.

"Tapi sebelumnya sebenarnya dari ketua Karang Taruna pada 1987, lalu karir pertama saya pernah menjadi hansip selama 2 tahun dari 1990-1992 sampai diangkat masuk BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPDM). Sampai saya nyalon kuwu dan menang," ungkap Hanafi.

Hingga tepatnya setahun setelah ia berhenti menjadi kepala desa, Hanafi mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Fraksi Golkar. Ia pun terpilih hingga di periode keduanya saat ini.

Di periode kedua, Hanafi pun masuk dalam anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon yang membidangi perekonomian.

"Di periode pertama saya masuk di komisi I tapi saya banyak tidak mengerti karena bukan keahlian saya. Tapi semenjak di komisi II, saya merasa ini tempat saya karena saya petani dan pengusaha," ujarnya.

Bagi Hanafi perjalanan hidupnya tak lepas dari usaha yang telah ia lakukan. "Prinsipnya kita harus berkerja keras, lalu kerja cerdas. Dan juga harus bisa memanfaatkan peluang," pungkasnya. •Suf/Par



## Komisi I Gali Pengelolaan Aduan Publik KID Jabar

Komisi I sambangi KID Provinsi Jawa Barat, setelah menilai pengelolaan pengaduan publik KID Kabupaten Cirebon dirasa belum optimal tindaklanjuti aduan. Apa sarannya?



Penyelenggaraan sistem pengaduan sengketa informasi publik Komisi Informasi Daerah (KID) Kabupaten Cirebon dirasa belum optimal. Pasalnya, dari 300 aduan yang masuk selama tahun 2021, hanya 10 persen yang baru ditindaklanjuti.

Sedangkan selama 2020, Diskominfo dan KID Kabupaten Cirebon hanya menangani delapan sengketa informasi. Hal itu membuat Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon geram dan mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk secepatnya berbenah.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun mengunjungi kantor KID Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Hj Diah Irwany Indriyati menanyakan, upaya pelayanan aduan dan peran Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga proses pemilihan KID di Jawa Barat.

"Kami ingin *sharing* agar kiat sukses atau langkah KID Provinsi Jawa Barat bisa professional menjalankan fungsi-fungsinya agar bisa kita terapkan di Kabupaten Cirebon," kata Diah.

Selain itu, Anggota Komisi

I DPRD Kabupaten Cirebon Juanaedi juga menanyakan upaya yang harus dilakukan DPRD dalam menerima aduan dan persolan informasi di masyarakat.

"Di level desa, kita sering mendapatkan aduan soal informasi. Tapi kita perlu lebih detail mengetahui apa payung hukum UU terlebih dahulu yang mengatur informasi boleh diakses dan yang tidak," katanya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal pun mengakui, jika masih ada beberapa institusi pemerintah maupun publik yang belum sempurna dalam menyampaikan



informasi secara terbuka. Baik mengenai anggaran, kebijakan serta program yang tengah dijalankan. Meski demikian, ia mengklaim jika partisipasi informasi publik di Jawa Barat berada di atas rata-rata nasional.

"Seperti kita ketahui bersama, Komisi Informasi ini diamanatkan Undang-Undang (UU). Sehingga keterbukaan informasi yang didorong harus sesuai dengan regulasi dalam UU. Makanya kita tekankan di Jawa Barat agar bisa ideal," ujar Faisal.

Sementara dalam pemilihan komisioner KID, Faisal menerangkan, prosesnya dimulai

dari pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) sebanyak 15 orang yang selanjutnya diserahkan ke DPRD. Dari 15 orang tersebut, dikerucutkan kembali menjadi 5 orang terbaik melalui seleksi uji kepatutan dan kelayakan atau *fit and proper test*.

"Itu menjadi wewenang DPRD. Dimana kategori yang dipertimbangkannya berdasarkan hasil keputusan DPRD, satu anggota Incumbent yang bisa membantu lembaga, perwakilan dari jumlah gender serta perwakilan pemerintah daerah," ungkapnya.

Sementara mengenai regulasi

sengketa keterbukaan informasi, kata Faisal, telah diatur juga pada UU. Dimana KID sebagai *leading* yang menerima aduan secara register dan berdaya.

Dalam penyelesaian hukum sengketa komisi informasi, UU mengatur dua cara yang bisa ditempuh yakni, upaya mediasi dan adjudikasi. Meski begitu putusan mediasi tetap melalui bacaan putusan adjudikasi terlebih dahulu.

"Tapi kita berharap pemerintah harus banyak melakukan mediasi terhadap informasi-informasi yang tidak dikecualikan," terang Faisal.

Selama pemerintah atau eksekutif belum melakukan uji konsekuensi, kata Faisal, semua informasi sifatnya masih terbuka. Karena itu, harus ada uji konsekuensi untuk memilah informasi yang dikecualikan yang selanjutnya disahkan oleh bupati atau wali kota. Sehingga terdapat transparansi informasi yang layak publikasi dengan yang tidak.

Untuk itu Faisal berpendapat, keterbukaan informasi publik seharusnya bukan lagi hanya berada di pusran sosialisasi oleh KID, tetapi harus beranjak naik menuju upaya literasi. Sehingga keberadaan KID menjadi ruh bagi pelayanan di seluruh badan publik terutama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintah daerah.

"Kita berjuang bersama membangun keterbukaan informasi agar menjadi ruh dalam pelayanan publik dan mendorong OPD bisa transparan melalui *tag-line* yang kita buat 'Kalau Bersih Kenapa Risih,'" ungkapnya.

Faisal pun berharap, agar kinerja KID dalam menjalankan tupoksinya lebih optimal, DPRD bisa mendorong anggota KID di daerah sesuai kebutuhan.

"Harus di dukung anggaran dari DPRD, sehingga keberadaannya bisa dirasakan oleh masyarakat dan mampu menjalankan tupoksi dengan baik," pungkas Faisal. •Muiz



# Mohammad Luthfi: RKPD Jangan Hanya Bagi Anggaran

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, mengingatkan jika RKPD 2023 harus memuat setidaknya 5 Pokir untuk menuju Cirebon spektakuler. Seperti apa?



Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri kegiatan konsultasi publik Rencana Kerja Peringkat Daerah (RKPD) Kabupaten Cirebon untuk tahun 2023 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon.

Konsultasi publik menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan penyusunan RKPD tahun 2023 untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi selama ini di Kabupaten Cirebon. Hal itu disampaikan Bupati Cirebon H Imron M Ag dalam sambutan-

nya. Imron berharap forum itu akan menjadi langkah awal Kabupaten Cirebon bisa lebih maju di tahun depan.

"Ini merupakan forum evaluasi dan rancangan yang akan datang, maka kami perlu undangan yang datang benar-benar mendiskusikan program agar Kabupaten Cirebon bisa lebih maju lagi kedepannya," ujar Imron.

Dalam RKPD diisi penyusunan perencanaan daerah untuk periode 1 tahun agar menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan setiap daerah. RKPD ditetapkan

melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Moh. Luthfi pada awal sambutannya menyampaikan, Cirebon memiliki masalah yang sangat mendasar. Setiap pemangku jabatan harus memiliki tujuan dan visi yang sama untuk kebangkitan Kabupaten Cirebon.

"Saya ingin menyampaikan bagaimana kita semua bisa menyamakan arah gerak, ketika kita semua untuk masyarakat, pemerintah daerah, dan legislatif bisa memastikan bergerak ke arah yang sama. Saya yakin dari situ akan mendapatkan hasil



yang besar," ujar Luthfi.

Luthfi juga menuturkan, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang merupakan himpunan hasil riset dari masalah yang terjadi saat ini di kabupaten Cirebon.

"Kami sadar, kewenangan kami hanya soal kebijakan, *budgeting*, dan soal pengawasan. Salah satu cara untuk membangun Kabupaten Cirebon dengan kebijakan adalah melalui pokok pikiran kami," tuturnya.

Meskipun perlu waktu yang tidak sebentar, Luthfi bertekad untuk membuat Kabupaten Cirebon yang spektakuler. Dimana memiliki makna tidak hanya mampu menyelesaikan masalah saat ini tetapi bersiap menyelesaikan masalah yang akan datang.

Menurutnya, DPRD Kabu-

paten Cirebon memiliki mimpi agar Cirebon bisa menjadi kota yang spektakuler. Sejauh ini ada 5 Pokir yang menjadi pijakan DPRD. Yakni pertama mengenai pelayanan masyarakat yang berkaitan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan. Selanjutnya perbaikan infrastruktur yang berfokus pada penanganan banjir dan sampah.

"Ada juga mengenai pengangguran dan kemiskinan. Keempat pajak daerah dan terakhir pembangunan yang berbasis kawasan," ujarnya.

Dari kelima pokok pikiran DPRD, luthfi sangat yakin Kabupaten Cirebon mampu melampaui kabupaten atau kota besar di sekitar. Dia melihat potensi kawasan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pemasukan anggaran, dan itu harus

mulai dipikirkan.

"Mimpi DPRD yang perlu didorong adalah pengembangan kota sumber. Sembilan kecamatan di sekitar sumber ini harus menjadi satu menjadi kawasan kota baru mandiri. Selain itu, kita juga harus mulai memikirkan kawasan pariwisata. Target ujungnya adalah bagaimana perputaran uang yang ada di Kota Cirebon berpindah ke Kabupaten Cirebon," tegasnya.

Dia berharap rancangan RKPD kali ini benar-benar disusun dengan baik. Bukan hanya membagi anggaran yang cuma menyelesaikan masalah hari ini, namun juga yang akan datang. Pemangku kebijakan juga harus memikirkan pengembangan kualitas generasi khususnya di Kabupaten Cirebon.

"Mimpi kita 20 tahun ke depan harus kita pikirkan hari ini, supaya RKPD yang akan disusun oleh Bapelitbangda jelas arahnya ke mana. Tidak hanya membagi anggaran tapi tidak ada nilai yang kita dapat untuk ke depan. Selain itu, kita perlu pastikan anak-anak muda di Kabupaten Cirebon punya kualitas, ilmu, kompetensi, dan kapasitas kepemimpinan," tambah Luthfi.

Pemerintah daerah perlu memiliki pandangan ke depan, mimpi yang besar untuk membangun kabupaten Cirebon agar punya nilai tinggi. Selain itu, kita juga perlu memiliki komitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah besar.

"Saya selalu mengatakan, tujuan Kabupaten Cirebon menurut kami DPRD di 10 tahun ke depan yakni melampaui dari Semarang. Kita lihat posisi Cirebon di mata pulau Jawa, yang paling dekat dengan kita adalah Semarang. Yang menjadi kota besar," pungkasnya. •Par



## Komisi III Studi Banding Rutilahu dan Penataan Lingkungan Pedesaan

Pemkab Karawang dianggap berhasil dalam pembiayaan program rutilahu dan penataan lingkungan pedesaan. Komisi III berharap, Kabupaten Cirebon juga menerapkan.



Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang. Hal itu bertujuan untuk bertukar informasi mengenai inovasi program Penataan Lingkungan Pedesaan (PLP) yang dianggap berhasil dalam pelaksanaan program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sanitasi, jalan lingkungan hingga program Karawang *Caang*.

Dalam kunjungan, Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon diterima langsung oleh pejabat Dinas PRKP Kabupaten Karawang.

Kasi Dinas PRKP Kabupaten Karawang Sanny menyampaikan, sejauh ini terdapat 1.500 unit rutilahu sesuai data yang diperoleh kepala desa di Kabupaten Karawang pada 2021. Pemkab Karawang pun telah menetapkan biaya perbaikan rutilahu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kabupaten Karawang serta bantuan provinsi.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, lanjut Sanny, menempatkan program rutilahu sebagai skala prioritas selain mengenai pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2021. Hal itu sebagaimana tercatat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 yang mencanangkan pembangunan rutilahu sejumlah 6.400 unit dalam kurun waktu lima tahun.

"Tahun 2016 sudah dibangun 600 unit rumah, lalu pada tahun 2017 kita bangun 1.300 unit rumah, tahun 2018 rutilahu yang terbangun yakni 980 unit. Jadi kita masih punya sisa sekitar 3.500 rutilahu lagi yang harus dibangun hingga 2024 nanti," tambah Sanny.

Sanny mengungkapkan, jika program pembangunan rutilahu



yang menggunakan APBD daerah memiliki biaya anggaran yang berbeda dengan rutilahu provinsi maupun pusat, yakni hanya berjumlah Rp 42 juta untuk setiap rumah.

"Tapi kalau syarat pengajuan bantuan rutilahu hampir sama berdasarkan ajuan dari pemerintah desa atau kelurahan. Status tanah juga harus milik dan bersertifikat atau dilengkapi keterangan surat dari desa setempat," jelas Sanny.

Selain rutilahu, Pemkab Karawang juga memiliki program *Karawang Caang* sebagai upaya pemerataan pembangunan penerangan. Dengan harapan, menjadi stimulan yang dapat

merangsang pemerintah desa menambahkan penerangan sendiri di lingkungannya.

"Karawang *Caang* atau neonisasi ini bedanya dengan JPU kita lakukan penerangan jalan di kelurahan hingga pelosok desa. Melalui program ini, sekarang 30 kecamatan atau 309 desa sepanjang tahun 2021 sudah terpasang penerangan sebanyak 4.640 titik lokasi neonisasi," ungkap Sanny.

Semula pada 2019, Pemkab Karawang hanya akan memasang neonisasi sebanyak 3094 titik lokasi, namun, kata Sanny, pada 2021 ada penambahan hingga menjadi 4046 titik.

"Lokasi-lokasi yang dulu gelap dan rawan kriminalitas, dengan

adanya neonisasi sekarang warga nyaman dan aman saat melintas. Semua guna mewujudkan Karawang *Caang* hingga pelosok desa," tutur Sanny.

Baik rutilahu, neonisasi dan program sanitasi, Pemkab Karawang mengandalkan sumber anggaran yang bersumber dari APBD maupun anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Sementara untuk usulan kegiatan berasal dari proposal yang diajukan pemerintah desa dengan dasar adanya Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL).

Mengetahui itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana, yang juga menjadi pimpinan kunjungan Komisi III, begitu mengapresiasi atas langkah dan inovasi pembangunan yang ada di Kabupaten Karawang. Khususnya dalam penataan lingkungan di pedesaan yang bersumber dari APBD dan juga Pokir anggota DPR.

"Kami sangat mengapresiasi. Kami pikir banyak inovasi yang kelak bisa kita tiru dan diterapkan untuk Kabupaten Cirebon. Maka dari itu saya berharap Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) bisa belajar dan menerapkannya nanti," jelas Teguh.

Namun sebelum itu, Teguh mengingatkan untuk mencari dasar hukum terlebih dahulu untuk merealisasikannya sebelum diterapkan di Kabupaten Cirebon.

"Tapi saya sepakat jika anggaran Pokir bisa dimanfaatkan seperti di Kabupaten Karawang agar usulan pembangunan dari konstituen bisa diwujudkan dan manfaatnya bisa benar dirasakan langsung oleh masyarakat. Tapi kita juga harus punya dasar hukum lebih dulu," tutupnya. •Par.



## Komisi IV Sambangi Yogyakarta dalam Upaya Mitigasi Bencana Alam

Kota Yogyakarta dinilai menjadi salah satu kota yang telah berhasil dalam memitigasi bencana alam. Komisi IV pun pelajari upaya yang dilakukan Pemkot Yogyakarta.



Kota Yogyakarta menjadi salah satu daerah yang rawan potensi bencana. Mulai dari banjir, luapan air sungai, tebing longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga kebakaran. Hal itu disebabkan letak Kota Yogyakarta dikelilingi beberapa gunung, dan mengalir tiga sungai besar yakni, Sungai Code, Winongo dan Gajahwong. Namun pemerintah kota (Pemkot) Yogyakarta dianggap telah berhasil mengantisipasi rawan bencana alam sejak dini. Mereka telah bersiap, jika suatu saat terjadi bencana yang muncul sewaktu-waktu karena keberadaan tim reaksi cepat milik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, yang rutin melakukan sosialisasi dan latihan penanganan bencana. Capaian tersebut pun mengundang perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon yang dipimpin Wakil Ketua Rudiana pun berkunjung ke DPRD Kabupaten Bantul pada Desember 2021 lalu. Mereka ingin menggali informasi mengenai rahasia Pemkot Yogyakarta sigap dalam mitigasi bencana. Kunjungan diterima DPRD dan BPBD Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Yogyakarta-

ta Nurhidayat menjelaskan, penanganan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan, dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat, dan akurat. Menurutnya, pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi dampak atau risiko setelah bencana. Upaya yang dilakukan BPBD Kota Yogyakarta yakni berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik hingga kesadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.



Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Secara struktural, upaya yang dilakukan BPBD untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana yakni, menyiapkan rekayasa teknis bangunan yang tahan bencana. "Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalisasi terjadinya bencana," ujar Nurhidayat. Adapun tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang jika sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam, kata Nurhidayat, alam pasti menunjukkan tanda atau sinyal bahwa bencana akan

segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut. Nurhidayat mengungkapkan, jika penanganan bencana harus melibatkan semua tingkatan masyarakat dari tingkat nasional tertinggi sampai ke desa terkecil. Seluruh sistem, pengaturan, organisasi, rencana dan program yang berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan bencana. Ia pun membeberkan, cara pemkot Yogyakarta menghadapi bencana, yakni pertama penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi tim BPBD.

Kedua, pelatihan bencana kepada setiap pelajar dan keluarga.

Ia mengungkapkan, setiap tahun tim reaksi cepat BPBD Kota Yogyakarta telah dilatih oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui metode *hybrid learning*. Mereka dibekali beberapa materi mengenai penanganan bencana. Mulai dari manajemen bencana hingga pengendalian operasi pencarian dan pertolongan.

"Pelatihan personil BPBD di masa pandemi ini sangat penting, karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi. Baik dalam bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penanggulangan bencana pada masa pandemi Covid-19," jelas Nurhidayat.

Selain itu, sebagai tindak lanjut pelatihan dari BNPB, tim reaksi cepat BPBD Kota Yogyakarta juga menggelar pelatihan kesiapan menghadapi bencana ke sekolah-sekolah. Mereka membekali para pelajar tentang pengurangan risiko bencana.

Selain ke pelajar, lanjut Nurhidayat, edukasi penanggulangan bencana juga dilakukan kepada anggota keluarga. Hal itu penting diterapkan sebagai unsur ketahanan masyarakat. Sehingga nantinya masyarakat bisa ikut menjaga keberadaan instrument mitigasi bencana.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina pun mengapresiasi langkah dan upaya Pemkot Yogyakarta. Menurutnya hal tersebut menjadi inspirasi bagi BPBD Kabupaten Cirebon nantinya.

"Kita tertarik upaya BPBD Kota Yogyakarta, semoga kita dapat meniru untuk menjadi bekal BPBD kami agar bisa lebih baik dalam mitigasi bencana," pungkas Siska.



## Bukit Manengteung Baru Dibuka, Diserbu Ratusan Wisatawan

Tak kurang sebulan Bukit Manengteung dibuka, namun telah dikunjungi ratusan wisatawan lokal. Pengelola punya iktidak Pemda memperhatikan.



**B**ukit Ajimut yang terletak di Desa Waled Asem, Kecamatan Waled, semula tak pernah terawat dan diperhatikan. Padahal jika dilihat, kondisi alam yang ada, sangat berpotensi menjadi wisata yang layak untuk dikunjungi.

Namun tidak hari ini, Bukit Azimut atau sekarang dikenal dengan Bukit Manengteung telah dilakukan pembenahan yang bersiap menjadi wisata yang tak kalah menarik.

Hal itu tak terlepas dari peran Pemerintah Desa (Pemdes) Waled yang sejak 2020 trengginas bergerak mencanangkan pembenahan bukit menjadi agrowisata.

"Sebelum itu, sebenarnya sempat ada sesepuh desa kami yang mendapat isyarat melalui mimpi kalau di sekitar Bukit Ajimut akan dibentuk Kawasan Wisata *Manengteung* (KWM). Tahun 2000 an mantan camat sini bermimpi kalau kawasan wisata nanti

akan diminati masyarakat," ujar Kuwu Desa Waled Asem Yanto.

Isyarat itu baru terealisasi pasca Yanto terpilih menjadi kuwu Waled Asem. Menurut Yanto, semula tak pernah ada yang berani memulai membenahi Bukit Ajimut. Alasannya, karena di sekitar lokasi, banyak lahan yang bukan milik aset Desa Waled Asem, melainkan milik individu masyarakat sekitar.

Saat Yanto mulai menjabat kepala desa, ia pun langsung menginisiasi pembuatan wisata alam di lokasi Bukit Ajimut. Yang rencananya akan dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Yanto menemui para pemilik lahan untuk membuat perjanjian hak sewa selama 10 tahun.

"Alhamdulillah mereka sepakat dengan pembagian 70 persen untuk Bumdes dan 30 persennya untuk pemilik lahan," ungkap Yanto.

Tak kurang dari 10 hektare luas lahan yang se-



mula bekas galian pasir, akan disulap menjadi wisata alam yang menarik. Saat ini, wisata Bukit Manengteung masih tahap pembangunan sekitar 30 persen. Namun beberapa ornamen pelengkap telah tersedia seperti gazebo, spot selfi dan *flying fox* yang tengah digarap.

Ketua Bumdes Berkah Jaya Desa Waled Asem Anang, mengungkapkan jika anggaran pembuatan wisata hanya mengandalkan dana dari desa.

"Kami masih dalam proses pengerjaan dengan bertahap, karena anggaran yang dipakai cuman dana desa, dan telah menyerap biaya Rp 100 juta," ungkap Anang.

Awal Januari 2022 lalu, Pemdes Waled Asem pun meresmikan pembukaan wisata Bukit Manengteung. Meski baru dibuka, banyak pengunjung yang telah memadati wisata.

Anang mengatakan, jika Bum-

des masih membutuhkan masukan dari para pengunjung agar wisata Bukit Manengteung dapat lebih ditingkatkan. Ia pun berharap suatu saat Bukit Manengteung akan menjadi satu-satunya ikon wisata alam di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

"Saya butuh masukan oleh para pengunjung kenapa di buka awal tahun lalu. Agar kita bisa berbenah dan menambah untuk pembangunan. Jika ditotal sudah ada 500 orang yang berkunjung ke sini dari berbagai daerah seperti Kuningan, Losari dan Babakan," jelas Anang.

Bagi para pengunjung, tak perlu khawatir akan merogoh kocek besar untuk menikmati keindahan alam Bukit Manengteung. Pasalnya harga tiket masuk yang disiapkan Bumdes masih terbilang cukup standar yakni Rp 5 ribu per orang.

Namun meski begitu, Anang mengeluh jika akses menuju

bukit masih memiliki kendala karena jalan yang berlubang dan rusak sehingga menjadi salah satu kritikan utama para pengunjung.

"Soal wisata kan sebenarnya yang utama mengenai aksesnya dulu, kami belum bisa bertindak apa-apa karena itu memang bukan jalan desa. Milik perusahaan, tapi beberapa kali saya coba komunikasi tapi tak pernah diindahkan," kata Anang.

Pemdes Waled Asem pun sangat berharap, agar dinas dapat menyentuh untuk membantu memperbaiki jalan. Yanto sangat membuka lebar kepada pemerintahan daerah, agar segera menilik potensi yang sedang dibangun oleh pihaknya.

"Selama ini memang belum ada respon dari dinas, kami sebenarnya menunggu. Karena mengandalkan anggaran dari desa saja, rasanya cukup lama untuk menyelesaikannya. Tapi untuk target di tahun 2023 Bukit Manengteung setidaknya sudah selesai atau paling tidak 80 persennya," terangnya.

Apa yang dilakukan Yanto bukan tanpa sebab. Pasalnya Yanto bercita-cita keberadaan wisata Bukit Manengteung akan dapat mendongkrak pendapatan desa. Selama ini Desa Waled Asem, hanya dapat meraup PADes dengan mengandalkan tanah titisara saja. Itu pun masih terbilang sangat minim jika digunakan untuk mengembangkan desa.

"Memang salah satu tujuan dibuatkan wisata untuk dongkrak PADes, menyerap tenaga masyarakat lokal dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Kami tidak mau hanya mengandalkan dari tanah titisara yang hanya Rp 20 juta per tahun," pungkasnya. •**Lan**



## Picungpugur Ingin Jadi Desa Ramah Anak

Pemdes Picungpugur berkeinginan menjadikan Desa Picungpugur sebagai desa ramah anak. Tanah desa di tengah permukiman warga pun disulap jadi area bermain anak. Seperti apa?



Pemerintah Desa (Pemdes) Picungpugur, Kecamatan Lemahabang, tampak serius dalam memberikan perhatian bagi anak-anak. Hal itu terlihat dari keberadaan lapangan olahraga dan spot khusus area bermain anak yang berdiri di samping kantor desa.

Setiap sore hari, di area tersebut puluhan anak-anak ramai menghabiskan waktu bermain. Sebagian menyukai permainan dengan berlari, berayunan, seluncuran, bulutangkis hingga bermain tradisional lainnya.

"Alhamdulillah, setiap sore puluhan anak-anak yang didampingi orang tuanya berdatangan di halaman ini untuk

bermain," ujar Kuwu Picungpugur Dwi Saki.

Dwi, sapaan akrabnya, memang memiliki visi mengubah desa Picungpugur sebagai desa yang ramah anak. Dwi berkeinginan mencegah kenakalan remaja sejak dini dengan memberikan ruang khusus bermain.

Menurutnya, anak-anak memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi agar bisa bertumbuh kembang secara baik. Kebutuhan tersebut bukan hanya terkait kebutuhan fisik, namun sosial, psikologis serta lingkungan yang mendukung untuk perkembangan potensi.

Oleh karena itu, Pemdes Picungpugur mendirikan area ber-

main anak di halaman seluas 300 meter persegi sebagai salah satu upaya penting guna memberikan ruang interaksi antar orang tua dan anak. Terutama untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para warga di wilayahnya.

"Dengan adanya area bermain ini, anak-anak kan jadi tidak main sembarangan. Orang tua juga jadi lebih tenang dalam melindungi anak-anaknya dari perilaku yang tidak diinginkan," jelas Dwi.

Meski begitu, Dwi mengaku Pemdes baru membangun satu ruang bermain anak di dusun I, sementara di dusun II belum tersedia. Disisi lain, warga dusun II juga menginginkan. Alasannya, kata Dwi, karena tak adanya lahan milik desa di tengah-tengah pemukiman warga di dusun II.

"Sebenarnya ada lahan sawah sekitar setengah hektare. Tapi letaknya jauh dari permukiman warga. Paling nanti akan kita bangun fasilitas olahraga saja," ujar Dwi.

Kedepannya, Pemdes Picungpugur berencana akan menambah fasilitas baru di area bermain anak yang telah tersedia dengan penambahan fasilitas WiFi. Sehingga selain untuk bermain, tempat tersebut nantinya dapat digunakan untuk belajar daring dengan akses internet gratis.

• **Muiz**

## Pabuaran Lor Gencar Benahi Alun-Alun

Pemdes Pabuaran Lor akan lanjutkan revitalisasi pembangunan alun-alun yang sempat mangkrak. Akan ada kios dan kolam pemancingan. Seperti apa?

Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Pabuaran, yang terletak di Jalan Pangeran Sutajaya selatan timur Cirebon tengah bersiap melanjutkan kembali pembangunan alun-alun yang sempat mangkrak. Kuwu Desa Pabuaran Lor Heri Castari mengungkapkan, ia telah mulai merancang kembali desain alun-alun yang diperkirakan menjadi pusat keramaian warga.

"Setelah rotasi camat, saya dapat intruksi untuk melanjutkan. Saya sudah buat desain alun-alun yang nanti akan menjadi taman bermain bagi warga kami maupun masyarakat sekitar," ungkap Heri.

Rencana itu pun, kata Heri, telah disepakati oleh seluruh elemen desa dari BPD hingga tokoh pemuda serta unsur masyarakat pada Musyawarah Desa (Musdes) beberapa waktu lalu.

Heri menerangkan, jika lahan seluas 1,5 hektare yang akan dibangun alun-alun tersebut bertujuan untuk mengurangi kawasan kumuh di sekitar lapangan yang selama ini tak tertata. Salah satu upayanya dengan mendirikan kios-kios guna para pedagang.

"Kita berupaya mengurangi tempat kumuh sekitar lapangan. Karena sejauh ini banyak pedagang yang berjualan di pinggir jalan yang mengganggu penggu-



Heri Castari (Kuwu Pabuaran Lor)

na jalan dan sampahnya berserakan. Makanya kita akan buat kios. Kita juga akan dirikan kolam untuk pemancingan," jelas Heri.

Sejauh ini, alun-alun tersebut baru memiliki taman bermain anak-anak yang diberi nama 'Taman Sutakriya' yang juga menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH). Heri pun optimistis, di tahun 2022 selain menyelesaikan sisa perbaikan jalan desa, Pemerintah Desa (Pemdes) Pabuaran Lor akan fokus membangun alun-alun.

"Tahun lalu kami sudah memperbaiki jalan di tiga dusun dari enam dusun yang ada di desa kami. Sekarang kami juga

akan fokus menyelesaikan sisa tiga dusun, sekaligus menganggarkan untuk pembangunan alun-alun tersebut," kata Heri.

Ia pun mengakui, jika perbaikan infrastruktur jalan serta membangun alun-alun memerlukan anggaran yang tak sedikit. Namun Heri tak kehabisan ide, demi mewujudkan itu semua, ia telah merumuskan untuk memanfaatkan aset tanah desa yang telah dikavling guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

"Tapi tentu kami berharap Pemda juga merespon baik rencana pembangunan alun-alun di Desa Pabuaran Lor ini agar didukung pula," pungkas Heri. • **Par**



## Kecomberan

# Berharap Wujudkan Sentra Kuliner

Pemdes Kecomberan berkeinginan membangun sentra kuliner demi kembangkan potensi daerah. Bagaimana langkahnya?



Pemerintah Desa (Pemdes) Kecomberan, Kecamatan Talun, tampak serius dengan cita-citanya membangun sentra wisata kuliner Talun.

Dengan mengusung visi menjadi desa mandiri, aman sejahtera, tertib dan rapih, Kuwu Desa Kecomberan Mastur Hidayat, pun bertekad untuk mengurai segudang masalah ini satu persatu. Ia berencana membangun sentra wisata kuliner di Jalan Ir Soekarno, Kecamatan Talun di area potensi lahan persawahan.

Seperti diketahui, Desa Kecomberan memiliki area persawahan yang cukup luas. Kendati demikian, tidak mudah bagi Mastur untuk mewujudkan

secepatnya membangun sentra kuliner. Pasalnya, ia akan lebih dahulu meningkatkan sumber daya warga dan fokus pada kesejahteraan pasca pandemi.

"Kita ingin warga juga sadar pentingnya memanfaatkan area untuk perekonomian. Meskipun saat ini kita memang masih fokus pada penanganan pandemi," ujarnya.

Kemelut pandemi Covid-19 yang masih belum juga usai begitu membatasi gerak langkah Mastur dalam mewujudkan harapannya itu. Akibatnya anggaran dana desa (ADD) masih diprioritaskan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi.

"Kita baru melakukan pem-

bagian bantuan baik BLT ke masyarakat. Akan tetapi, masyarakat juga perlu sadar akan potensi yang ada didaerahnya. Kita ingin adanya sentra kuliner bisa membantu warga mencapai kesejahteraan juga nantinya," kata Mastur.

Meski tantangan yang harus dihadapi tidak sedikit, Mastur tetap berupaya semaksimal mungkin dalam memecah permasalahan yang ada di daerahnya. "Lagi-lagi karena kepentok modal, mas," gurau Mastur.

Ia mengatakan, ADD saat ini belum cukup jika untuk dialokasikan pembangunan sentra kuliner dalam waktu dekat.

"Kami tetap akan mengupayakan sebisa kami demi mewujudkan sentra kuliner ini," katanya.

Ia pun akan memutar otak mencari pemasukan agar wisata kuliner dapat terealisasi. Mastur berharap dengan terwujudnya kawasan wisata kuliner yang tersentral nantinya, akan menjadi magnet yang dapat mengundang wisatawan baik lokal maupun luar daerah untuk berkunjung.

"Dengan begitu, penyerapan sumber daya lokal bisa lebih maksimal. Sehingga, taraf hidup masyarakat juga lebih meningkat dan mandiri. Mudah-mudahan rencana ini bisa terealisasi dengan segera," pungkasnya. •Mir

## Panongan

# Bersiap Bangun Wisata Arum Jeram

Pemdes Panongan akan menyulap Bendungan Batu Lintang sebagai tempat rekreasi wisata arum jeram.

Berpotensi menjadi wisata yang tak kalah menarik, Pemerintah Desa Panongan, Kecamatan Sedong, akan mengoptimalkan keberadaan bendungan Batu Lintang.

"Memang sebenarnya sudah menjadi tempat wisata kecil-kecilan tetapi kita ingin menambah wahana seperti arum jeram sepanjang 1 km, agar menjadi daya tarik bagi masyarakat nantinya," ujar Sekretaris Desa Panongan Ismail.

Ismail mengatakan, Desa Panongan memiliki kekayaan sumber alam yang cukup memadai. Pasalnya, secara geografis memiliki luas wilayah 245 hektare. Terbagi dari 134 hektare sawah dan 111 hektare pemukiman. Sementara jumlah penduduk mencapai 4.700 jiwa.

Hal itu membuat Pemerintah Desa (Pemdes) tengah menyiapkan sejumlah program unggulan. Salah satunya mengenai pengembangan potensi yang sudah ada seperti Bendungan Batu Lintang.

Ismail menuturkan, jika tahun 2022 ini, akan menjadi pintu awal untuk melanjutkan kembali rencana pengembangan yang sempat terhenti. Meski belum sepenuhnya bebas dari jeratan pandemi, tapi Pemdes Panongan akan tetap berusaha untuk berubah.

"Targetnya memang tahun ini untuk membangun tempat



Ismail (Sekdes Panongan)

rekreasi Batu Lintang, meski anggaran masih terpotong tapi kita tetap optimis dan terus berusaha," tutur Ismail.

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi sebelumnya juga sempat mengunjungi wisata Batu Lintang, dan merespon baik atas program yang dicanangkan Pemdes Panongan tersebut.

"Pas kunjungan kemarin Kang Luthfi juga ke sini, ia menyambut baik atas program kami. Semoga itu bisa menjadi gebrahan besar kata Kang Luthfi kepada kami," ungkap Ismail.

Pemdes Panongan memiliki keinginan para pemuda desa tidak lagi merantau ke luar kota karena bekerja. Sehingga dihar-

apkan wisata yang akan dibangun dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Ya memang tujuan utamanya agar masyarakat lokal dapat bisa bekerja di sini. Banyak yang merantau di Jakarta sebagai kuli bangunan. Kita ingin masyarakat lokal dapat menghidupi desa," jelas Ismail.

Selain itu, Ismail juga mengungkapkan selama ini Pemdes Panongan hanya mengandalkan pendapatan asli desa (PADes) dari kios-kios dan tanah titisara saja.

"Tahun kemarin, PADes Panongan baru mencapai sekitar Rp 50 juta, itu pun dari kios Rp 30 juta selebihnya dari tanah titisara," tandasnya. •Lan



Mohamad Luthfi



## Tolok Ukur

**M**alam semakin larut, entah ini tamu yang ke berapa. Sudah mengantuk juga sebenarnya. Namun, mata ini tiba-tiba menemukan ke-segarannya kembali, ketika ia melemparkan pertanyaan yang tak biasanya dilakukan para tamu.

“Kang, apa yang sudah dibangun selama 10 tahun terakhir di Kabupaten Cirebon?” Pertanyaan pendek, namun jawabannya bisa panjang. Tentu disini bukan ruang untuk menjawab pertanyaan itu secara detail.

Saya melihat pertanyaan itu sebagai curhat, bahwa ia tidak merasakan pembangunan di Kabupaten Cirebon. Ketika rakyat merasakan seperti itu, pertanyaannya: Benarkah tidak ada upaya membangun kabupaten ini? Benarkah pemerintah tidak bekerja?

Selama 10 tahun terakhir saya yakin pemerintah sudah bekerja. Tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Buktinya APBD terserap. Lantas masalahnya dimana? Kenapa ada gap antara apa yang dirasakan masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah?

Gap terjadi ketika tidak adanya kesamaan tujuan atau keinginan antara rakyat dengan pemerintah. Bisa jadi, masyarakat inginnya apa, pemerintah mengerjakannya apa (yang lain).

Pada titik inilah perlunya tolok ukur yang sama. Sesuatu yang dipakai sebagai dasar mengukur (atau menilai)-nya harus sama; patokannya sama; atau standar-nya sama. Maka, sejak awal belanja pemerintah harus dibuat ‘membumi’, berdasarkan masalah nyata yang dihadapi masyarakat.

Tolok ukur setidaknya harus diterapkan dalam tiga hal. Paling penting dan awal adalah perencanaan atau penyusunan program kegiatan. Tahapan ini harus memiliki tolok ukur sama antara para pemangku kepentingan.

Jangan sampai perencanaan hanya sekadar rutinitas tahunan atau seremoni belaka. Penyusunan anggaran tidak hanya merupakan rangkaian seremoni penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara), dan APBD.

Tentu saja proses itu, secara administratif memiliki tolok ukur perencanaan yang sama. Namun permasalahannya apakah tolok ukur perencanaan hanya administratif. Perilaku *copy-paste* juga bisa memenuhi standar administratif, tapi apakah itu yang disebut perencanaan?

Hal fundamental dari perencanaan adalah bahwa apa yang direncanakan itu menjawab masalah. Nah, untuk itu, di dalam perencanaan harus ada tolok ukur kedua yakni ‘proses’, dan tolok ukur ketiga, yakni ‘hasil’. Agar setiap kegiatan, yang terumuskan mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tolok ukur proses ini penting untuk memastikan bahwa apa yang akan dilakukan memiliki cara yang benar-benar menjamin hasil. Ada kesinambungan tahapan antara satu periode pengerjaan dengan periode berikutnya. Ada kemenyatuan antara satu bidang atau dinas dengan dinas lainnya.

Berikutnya adalah tolok ukur hasil. Indikator keberhasilan program harus terumuskan dengan jelas, nyata, dan terukur, bukan indikator yang bersifat normatif dan retorika belaka. Jika semua tolok ukur tersebut ada dalam rangkaian penyusunan anggaran, bisa dipastikan APBD akan lebih berkualitas.

Sehingga harapannya, birokrasi bukan lagi sebagai pabrik dokumen, yang menghasilkan atau mengumpulkan surat-surat dan laporan pekerjaan yang beribu-ribu halaman. Tapi hadir sebagai *problem solver*, sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Jadi gandenglah selalu tol-o-k ukur, agar kinerja terukur. Bukan tol-a-k ukur, karena engkau akan menolak diukur. Biasakanlah sekarang mengucapkan tolok ukur (bukan tolak ukur), karena tolok ukurlah kata yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia.

Jika, ‘tolak ukur’ yang dipakai, maka pasti akan terjadi gap antara harapan masyarakat dengan kinerja pemerintah. Untuk itu mari kita budayakan tolok ukur saja.







DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON



# VAKSIN COVID-19

## Mengapa harus divaksinasi?

Ketika kamu divaksinasi, kemungkinan untuk menularkan penyakit ke orang lain tentu akan berkurang, karena risiko tubuhmu untuk terinfeksi penyakit pun turut berkurang. Dengan mengikuti vaksinasi Covid-19, kita tak hanya menyelamatkan diri sendiri, namun juga melindungi mereka yang rentan.